

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah prosedur sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan prosedural dalam pemilu. Di Kota Pariaman, PSU di TPS 3 Desa Naras Hilir dilakukan karena adanya malprosedur, yaitu pemberian izin memilih kepada pemilih yang tidak memiliki KTP sesuai domisili dan tidak memiliki surat pindah memilih. Penyebab utama kesalahan ini adalah kurangnya pemahaman KPPS terhadap prosedur pemilihan, lemahnya komunikasi antarp penyelenggara pemilu, serta rendahnya kualitas SDM KPPS akibat perekrutan yang dipengaruhi oleh "titipan" tanpa memperhatikan kualifikasi. Selain itu, kurangnya fokus dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) dan rendahnya minat baca juga berkontribusi pada kesalahan ini. PSU akhirnya diputuskan oleh KPU Kota Pariaman berdasarkan rekomendasi Bawaslu untuk menjaga integritas pemilu.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Naras Hilir, Kota Pariaman pada Pemilu 2024 terjadi akibat kurangnya pemahaman petugas KPPS terhadap regulasi pemilu. Hal ini menimbulkan berbagai dampak, baik sosial, administrasi, politik, maupun ekonomi. Dampak sosial terlihat dari menurunnya partisipasi pemilih akibat kejenuhan dan kendala waktu. Dampak administrasi mencakup peningkatan beban kerja bagi penyelenggara pemilu tanpa tambahan honor. Dari sisi politik, PSU merusak integritas pemilu dan mempengaruhi hasil pemilihan. Sementara itu, secara ekonomi, PSU membutuhkan tambahan anggaran dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

3. Analisis Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena bertujuan untuk menegakkan keadilan, musyawarah, kebebasan, persamaan, dan amanah dalam proses pemilu. PSU bukan hanya sekadar perbaikan teknis, tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat secara sah dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam bernegara.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang dikemukakan, maka juga diberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Untuk menghindari terjadinya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu berikutnya di Kota Pariaman, maka diharapkan kepada Badan Penyelenggara Pemilu Kota Pariaman khususnya KPU Kota Pariaman dalam melakukan penyeleksian terhadap Penyelenggara Pemilu *Adhoc* yaitu PPS & KPPS benar-benar orang yang memiliki sumber daya yang handal dan mempunyai integritas yang tinggi. Dan diharapkan agar dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik terhadap pemilih terutama tentang tata cara penggunaan hak pilih dan potensi pelanggaran yang berimplikasi Pemungutan Suara Ulang.
2. Diharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memiliki strategi yang lebih matang dalam mengantisipasi dampak dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang seperti melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan melaksanakan pemungutan suara dihari libur agar tidak terjadi penurunan partisipasi secara drastis.
3. Diharapkan kepada Badan Penyelenggara Pemilu Kota Pariaman melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pengawasan yang ketat agar setiap langkah dalam proses pemilu mencerminkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Departemen Agama RI, 2008.
- Abbas, Hasyim. *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Kutub, 2004.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, M. 2016. *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Mawardi, Imam. 2014. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* / Imam Al-Mawardi; Penerjemah, Khalifurrahman Fath & Fathurrahman; Penyunting, Ikhlas Hikmatiar. Jakarta: Qisthi Press.
- Arifin, Muhammad Daniel. 2022. *Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang*. Padang: Universitas Eka Sakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Press.
- Auda, Jasser. 2014. *Maqasid AL-Syari'ah*, Terjemahan Rosidin, Ali Abd el-mun'im. La Tansa Press, April.
- Awwa, Muhammad Sallim. 2008. *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah. Dar as-syuruq*.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Baraja, Abdul Qadi. 2001. *Gambaran Global Pemerintahan Islam*. Surabaya: RAP.
- Bilhusna, Salma. 2024. *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 Di Kota Solok Prespektif Fiqh Siyasah*. Padang: Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

- Boisard, Marcel A. 1980. *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa H.M Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiman, Arief. 2002. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cresswell, Jhon W. 2014. *Research Deseign; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dzajuli, A. 2004. *Fiqh Siyasah "Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*. Jakarta: Kencana.
- Erwin, Muhamad Erwin. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. Ketiga.
- Fahmi, Mutiara. 2017. *PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAMDALAM PERSPEKTIF ALQURAN*, Aceh: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 2, Number 1.
- Felicia Patricia & Chindy Yapin. 2019. *PENGUATAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI REKONSTRUKSI KESADARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM*, Tarumanagara: Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember.
- Frenki. 1997. *ASAS-ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH*. Grafindo Persada.
- Hanafi, Muhammad. 2013. *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 2 Desember.
- Harahap, Hasrul. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Pemilu pada Serentak Tahun 2015*. Jurnal Reinaissanc.
- Harahap, Khrisna. 2023. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiiti.
- Hidayat, Aat. 2015. *"Syura dan Demokrasi dalam Pespektif Al-qur'an"* ADDIN, Vol. 9, No. 2
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007.

- Jafar, Wahyu Abdul. 2018. *FIQH SIYASAH DALAM PRESPEKTIF AL QUR'AN DAN HADITS*, Bengkulu: AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1.
- Lewis, Bernard. 2002. *Islam Liberalisme Demokrasi*. Diedit oleh Terj. Mun'im A. Sirry. Jakarta Selatan: Paramadina.
- M. Anshori G. 2011. *Fiqh Siyasa: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Fadel. 2017. *Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mulyana, Indra, Dkk. 2024. *SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*. Ciamis: Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 12 Nomor 2.
- Prasetyo, Teguh. 2021. *Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilu*. Banten: Nusamedia.
- Pulungan, Suyuthi J. 2003. *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Syafii, A. *Islam dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Purnamasari, Diah. 2015. *Amandemen Undang-Undang Pilkada*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan Surbakti. 2024. "Pemilu Berintegritas dan Adil", Kompas, February 14.
- Reginantis, Alfara, dkk. 2024. *Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya.
- Salampessy, Maryam, dkk. 2023. *PENEGAKAN HUKUM PEMILU*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Saleh. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samuddin, Rapung. 2013. *Fiqh Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press.
- Santoso, Topo & Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sari, Novia Permata Sari & Irwan Saputra, 2024, *Konsep Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Al-Qur'an*, lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, Vol. 3 (1)
- Sattar, Abdul Mufis Abdul. 2010. *Sistem Pemeritahan dalam Islam*. Jakarta: ter Tajjudin Pogo, Pustaka Ikadi.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *wawasan al-quran tafsir: tematik dan berbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung; Pustaka Setia.
- Sodikin, Ali. 2012. *FIQH USHUL FIQH: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Belanda Publishing.
- Suharyat, Yayat. 2019. *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Sukarja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press.
- Tahir Azhary, Muhammad. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.
- Tiem Depag. 1996. *Islam Untuk disiplin Ilmu Hukum, sosial dan Politik*. Jakarta: Depag RI
- Zoelva, Hamdan. 2009. *Nagara hukum dalam Perspektif Pancasila*, Kumpulan makalah Konggres pancasila, Kerja sama Univesitas Gadjah Mada dan Mahkamah Konstitusi 30 Mei – 1 Juni.
- Zulhendra, Joni. 2022. *PEMILU (PEMILIHAN UMUM) DALAM KAJIAN POLITIK ISLAM*, Padang: Universitas Taman Siswa, Volume 10 Nomor 1 tahun.

B. Wawancara

- Junaldi Ismail, (2024, Desember Senin). Dampak Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. (R. Jannah, Interviewer)
- Junaldi Ismail, (2024, Desember Senin). Koordinasi antar Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Pariaman. (R. Jannah, Interviewer)

Junaldi Ismail, (2024, Desember Senin). Penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman. (R. Jannah, Interviewer)

Junaldi Ismail, (2024, Desember Senin). Permasalahan SDM Penyelenggara Pemilu. (R. Jannah, Interviewer)

Monica Nahda, (2024, Januari Kamis). Dampak Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. (R. Jannah, Interviewer)

Monica Nahda, (2024, Januari Kamis). Faktor Lemahnya SDM dari KPPS. (R. Jannah, Interviewer)

Monica Nahda, (2024, Januari Kamis). Penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman. (R. Jannah, Interviewer)

Monica Nahda, (2024, Januari Kamis). Upaya yang dilakukan PTPS untuk mencegah pelanggaran. (R. Jannah, Interviewer)

Novia Vandini, (2024, Desember Rabu). Dampak Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. (R. Jannah, Interviewer)

Novia Vandini, (2024, Desember Rabu). Faktor Lemahnya SDM dari KPPS. (R. Jannah, Interviewer)

Novia Vandini, (2024, Desember Rabu). Penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman. (R. Jannah, Interviewer)

Novia Vandini, (2024, Desember Rabu). Prosedur Bimtek KPPS. (R. Jannah, Interviewer)

Riswan, (2024, Desember Senin). Dampak Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. (R. Jannah, Interviewer)

Riswan, (2024, Desember Senin). Penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu 2024 di Kota Pariaman. (R. Jannah, Interviewer)

C. Peraturan dan Website

Bawaslu Kota Pariaman, Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman. <https://pariaman.bawaslu.go.id/>. 2024

Disdukcapil Kota Pariaman. Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman. <https://disdukcapil.pariamankota.go.id/>. 2024

KPU Kota Pariaman, Website Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
<https://kota-pariaman.kpu.go.id/>, 2024

Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/11334381/hasil-lengkap-pemilu-2024-pilpres-dan-pileg>. 2024

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Pemilihan.

Surat Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 150 Tahun 2023 tentang Penetapan Peserta Pemilu tahun 2024.

Surat Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 251 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024.

Surat Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Dasar 1945 BAB VII Pasal 22E tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.